

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Yogyakarta, Cet. III, Yogyakarta, 2004.

C.S.T. Kansil, dkk, *Pemerintah Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.

Hasim Purba, dkk, *Hubungan Pemerintah Propinsi Dengan Kabupaten/Kota*, CV. Mentari Persada, Medan, 2004.

Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk ke-5, Rajawali Perss, Jakarta, 2014.

_____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke-2 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

_____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, GamaMedia, Yogyakarta, 1999.

Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, , Setara Press, Malang, 2012.

Muchamad Isnaeni Ramdhan, *Kompedium Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.

Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

_____, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

_____, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Armico, Bandung, 2002.

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2014.

Suharizal, *Pemilukada, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011.

Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Per-Undang-Undangan*

Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 1983.

Pipin Syarifin, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy,
Bandung, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan NASIONAL, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah
Dari Masa Ke Masa*, Pelajar Pustaka, Yogyakarta, 2013.

R. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
1992.

Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-
1980*, LP3ES, Jakarta, 1991.

Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2017.

B. Jurnal

Amir F Kotarumalos, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Suatu Upaya

Membangun Demokrasi Diranah Lokal”, *Jurnal Hipotesa* Vol. 3 No.

1 Mei 2008, STIA Alazka.

Anna Triningsih, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara*, Jurnal Konstitusi, Edisi No 1. Volume 13. Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

Andi Mattalatta, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 6, 2012.

Ali Marwan Hsb, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 03 - September 2016.

Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017.

Djauhari, *Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam Perspektif Sosiologis)*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.

Ian Pasaribu, *Pilkada Serentak Dan Hukum Politik: Kontroversi Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Putusan Hukum Pilkada Kabupaten, Simalungun Sumatera Utara Tahun 2015*, *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 1, April 2017.

Iemas Masithoh M. Noor, "*Dinamika Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", *Jurnal Litigasi* Vol. 10 No. 1 Tahun 2009, Universitas Pasundan Bandung.

Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, *Jurnal Muqtasid* Volume 6, Nomor 1, Juni, 2015.

Marulak Pardede, Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18 No. 2, Juni 2018.

Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi" *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol 1 (2), 2005.

Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 Nomor 2.

Penyusun, *Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2010.

Retno Saraswati "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 2 Jilid 40, April 2011.

R. Nazriyah, Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

D. Data Elektronik

Ali Brata, Sejarah Pemilukada di Indonesia, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/aribarata/55004b26813311ca60fa78b8/sejarah-pemilu-kepala-daerah-di-indonesia> (diakses pada tanggal 30 November 2019)

Aswab Nanda Pratama "Riwayat Pilkada di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/06000041/riwayat-pilkada-di-indonesia?page=all>. (diakses pada tanggal 30 November 2019 pukul 10.20WIB)

Dinamika Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Reformasi, dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/66600> (diakses pada hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 13.20 WIB)

<http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/6/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-andikasmaw-292-1-humanis-1.pdf> (diakses pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2019 pukul 22.00 wib)

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/6586/4951> (diakses pada hari Rabu tanggal 20 November pukul 19.20 WIB)

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Sabtu tanggal 28

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> ,(diakses pada hari tanggal 28 November 2019 Pukul 15.00 WIB)

<https://belajarkhukumonline.wordpress.com/2015/11/24/sejarah-dan-perkembangan-politik-hukum-di-indonesia/> (di Akses Pada Tanggal 29 November 2019 Pukul 11:00 WIB)

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejarah_Indonesia&action=edit§ion=47 (di Akses Pada Tanggal 29 November 2019 Pukul 11:10 WIB)

<https://belajarkhukumonline.wordpress.com/2015/11/24/sejarah-dan-perkembangan-politik-hukum-di-indonesia/> (di Akses Pada Tanggal 29 November 2019 Pukul 11:12 WIB)

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejarah_Indonesia&action=edit§ion=48 (di Akses Pada Tanggal 29 November 2019 Pukul 11:20 WIB)

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejarah_Indonesia&action=edit§ion=49 (di Akses Pada Tanggal 29 November 2019 Pukul 11:23 WIB)

<https://www.endriksafudin.com/politik-hukum-ham-di-indonesia/> (di Akses Pada Tanggal 29 November 2019 Pukul 11:30 WIB)

Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, dikutip dari <http://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/KAJIAN-EVALUASI-PERDA-BINTAN.pdf> (diakses pada tanggal 1 Desember 2019).

Ranti Fatya Utami, 11 Undang-Undang Yang Mengatur Pemerintahan Daerah Di Indonesia, dikutip dari <https://gurupkn.com/undang-undang-yang-mengatur-pemerintahan-daerah> (diakses pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pukul 10.20 WIB)

https://www.sayanda.com/otonomidaerah/#Pengertian_Otonomi_Daerah_Menurut_ParaAhli di akses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 21.09 WIB di akses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 22.23WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171006181032-32-246711/kpu-anggaran-pilkada-2018-capai-rp114-triliun> (diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB)

<https://www.merdeka.com/politik/kpu-sebut-isu-sara-di-pilkada-picu-konflik-horizontal.html> (diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 10.10 WIB)

<https://news.detik.com/berita/d-3810387/ini-13-daerah-dengan-calon-tunggal-di-pilkada-2018> (diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 10.12 WIB)